SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, BARU, S.Pd.,M.Si Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19700228 199803 1 007
	Nama SOP	Pelayanan Penanganan Keberatan Informasi Publik di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi 3. Peraturan Pemerintah No.61 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 2003 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	1. Mengetahui proses pelayanan informasi dan mengidentifikasi informasi publik yang terbuka dan tertutup; 2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik dan pengetahuan informasi publik; 3. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan; 4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien; 5. Berpenampilan menarik, santun dan berjiwa melayani.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Penerimaan Tamu 2. SOP Pelayanan Informasi Pubftk di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah 3. SOP Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi	1. Komputer/Laptop/Printer/Scanner 2. SK Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 3. Jaringan Internet	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penanganan keberatan tidak berjalan	Disimpan dalam bentuk dokumentasi tercetak dan elektronik	

SOP PELAYANAN PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Pelayan Informasi	Atasan PPID	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyampaikan pengajuan keberatan					Form Pernyataan Keberatan (kosong) dan Kartu Identitas	10 menit	Form Pernyataan Keberatan telah diisi oleh pemohon	Keberatan diajukan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penolakan berdasarkan pengecualian informasi. tidak disediakan informasi berkala, tidak ditanggapinya permohonan, informasi yang dibenkan tidak sebagaimana permohonan, tidak dipenuhinya permohonan. pengenaan biaya yang tidak wajar. penyampaian informasi melebihi batas waktu
2.	Melakukan verifikasi terhadap pengajuan keberatan					Permohonan keberatan pemohon informasi	30 menit	Form Pernyataan Keberatan telah diisi oleh pemohon, tanda terima	<ul style="list-style-type: none"> a. Memeriksa batas waktu pengajuan dan kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan keberatan b. Jika permohonan keberatan diajukan diluar batas waktu, maka permohonan keberatan ditolak, c. Jika masih dalam batas waktu, namun syarat kelengkapan pengajuan keberatan belum lengkap sebagaimana maka pemohon diminta untuk melengkapi d. Jika syarat kelengkapan sudah dipenuhi maka diberikan tanda terima permohonan keberatan, selanjutnya permohonan keberatan informasi disampaikan kepada Atasan PPID
3.	Mengadakan rapat dengan PPID dan Tim Pertimbangan PPID untuk meminta pertimbangan dan saran					Form Pernyataan Keberatan yang telah terisi oleh pemohon	30 menit	Disposisi

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Pelayan Informasi	Atasan PPID	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
4.	Membuat surat tanggapan atas keberatan permohonan informasi								
5.	Menandatangani surat tanggapan atas keberatan permohonan informasi								
6.	Memberikan tanggapan atau keputusan Atasan PPID kepada pemohon								
7.	Mendokumentasikan dokumen keberatan informasi dan jawaban atas keberatan dari Atasan PPID